

Tugas 3

"Analisis Konflik Pembangunan Rempang Eco City dalam Perspektif New Public Service (NPS) ."

Dosen Pengampu : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Disusun Oleh :

Angelica Ivana Nadia C. H.

2316041085

nindy pavita priscilla dilla

2356041037

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika kebijakan yang diambil menyangkut kepentingan masyarakat yang telah lama menetap di suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat memunculkan konflik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta apabila proses perencanaan maupun pelaksanaannya tidak mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu contoh konflik pembangunan yang menjadi perhatian nasional adalah penolakan pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dirancang untuk menjadi kawasan industri, perdagangan, serta pariwisata terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyek ini dilaksanakan oleh BP Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Di sisi lain, masyarakat Pulau Rempang menolak rencana pembangunan tersebut karena mereka telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun sejak abad ke-19. Rencana relokasi terhadap sekitar 16 kampung tua Melayu menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta identitas budaya yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Penolakan tersebut memuncak pada 7 September 2023 ketika terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan dalam proses pengukuran lahan yang mengakibatkan penggunaan gas air mata serta menimbulkan korban dari masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang terdampak. Konflik Rempang Eco City merupakan contoh nyata konflik dalam manajemen publik karena melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, masyarakat, investor, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak

masyarakat, kepastian hukum atas tanah, transparansi kebijakan, serta proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pembangunan, tetapi juga pada keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif manajemen publik, konflik ini relevan dianalisis menggunakan paradigma New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt. Paradigma NPS menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat (*serving rather than steering*) dengan mengutamakan dialog, kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan warga negara dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik. Melalui paradigma tersebut, konflik Rempang dapat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip pelayanan publik telah diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penyebab, dinamika, dan dampak konflik pembangunan Rempang Eco City serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip New Public Service dalam penyelenggaraan manajemen publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik pembangunan Rempang Eco City?
2. Bagaimana kronologi konflik Rempang Eco City?
3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik?
4. Bagaimana dampak konflik terhadap masyarakat dan pemerintah?
5. Mengapa konflik Rempang Eco City dapat dianalisis menggunakan paradigma New Public Service (NPS)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan latar belakang konflik pembangunan Rempang Eco City.
2. Menjelaskan kronologi konflik beserta aktor yang terlibat.
3. Menganalisis penyebab konflik yang terjadi.
4. Menjelaskan dampak konflik terhadap masyarakat dan pemerintah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Konflik

Pembangunan Rempang Eco City merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan energi hijau. Program ini diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek tersebut dikelola oleh BP Batam bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang. Meskipun memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan proyek ini justru memunculkan konflik yang cukup besar antara pemerintah dan masyarakat lokal. Konflik terjadi karena sebagian besar warga Pulau Rempang menolak rencana relokasi yang menjadi syarat pelaksanaan proyek. Masyarakat berpendapat bahwa mereka telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun selama lebih dari satu abad sehingga memiliki hubungan historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat dengan tanah yang mereka tempati. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan masyarakat yang ingin mempertahankan hak atas tanah leluhur menjadi awal munculnya konflik publik yang mendapat perhatian nasional (Kompas.com, 2023).

Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen publik, konflik Rempang Eco City menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam kajian administrasi dan manajemen publik.

2.2 Kronologi Konflik

Konflik pembangunan Rempang Eco City mulai mengemuka pada tahun 2023 ketika pemerintah mempercepat pelaksanaan proyek sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pembangunan menuju permukiman baru yang telah disiapkan. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat karena mereka merasa belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai status tanah, mekanisme relokasi, maupun jaminan kehidupan setelah dipindahkan. Masyarakat juga menganggap bahwa kampung-kampung yang berada di Pulau Rempang merupakan kampung tua Melayu yang telah ada sejak abad ke-19 sehingga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.

Puncak konflik terjadi pada tanggal 7 September 2023 ketika aparat keamanan melakukan pengamanan proses pengukuran lahan oleh BP Batam. Penolakan masyarakat menyebabkan terjadinya bentrokan antara warga dan aparat. Dalam peristiwa tersebut aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, yang kemudian berdampak hingga ke lingkungan sekolah sehingga menyebabkan kepanikan di kalangan siswa dan masyarakat sekitar. Kejadian tersebut mendapat perhatian luas dari media nasional, organisasi masyarakat sipil, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Setelah konflik meluas, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap proses relokasi dan berupaya membuka ruang dialog dengan masyarakat agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai (BBC News Indonesia, 2023).

2.3 Penyebab Konflik

Konflik Rempang Eco City dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Banyak warga merasa tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan sehingga aspirasi mereka tidak berakomodasi secara maksimal. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan tanah. Masyarakat menganggap tanah yang mereka tempati

merupakan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan pemerintah mengacu pada ketentuan pengelolaan kawasan yang berada di bawah kewenangan BP Batam.

Faktor lain yang memperburuk konflik adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan pembangunan, mekanisme relokasi, serta bentuk kompensasi yang akan diberikan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah lebih menitikberatkan pada percepatan investasi demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional, sementara masyarakat lebih mengutamakan keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya memicu konflik berkepanjangan.

2.4 Dampak Konflik terhadap Masyarakat dan Pemerintah

Konflik Rempang Eco City memberikan dampak yang cukup luas, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, konflik menyebabkan munculnya rasa takut, trauma, dan ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka. Aktivitas pendidikan sempat terganggu akibat bentrokan yang terjadi di sekitar sekolah. Selain itu, sebagian masyarakat mengalami kesulitan menjalankan aktivitas ekonomi karena situasi yang tidak kondusif. Konflik juga berpotensi mengganggu hubungan sosial antar warga akibat adanya perbedaan sikap terhadap rencana relokasi.

Bagi pemerintah, konflik menghambat pelaksanaan proyek pembangunan dan menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Pemerintah dinilai belum mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan mengalami penurunan. Selain itu, pemerintah harus mengeluarkan upaya tambahan untuk melakukan mediasi, dialog, dan evaluasi terhadap kebijakan relokasi agar konflik tidak semakin meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola hubungan dengan masyarakat.

2.5 Analisis Konflik Berdasarkan Paradigma New Public Service (NPS)

Konflik Rempang Eco City dapat dianalisis menggunakan paradigma New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt. Paradigma ini menekankan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai pelayan masyarakat (*serving rather than steering*), sehingga setiap kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan warga negara melalui partisipasi, dialog, transparansi, dan kolaborasi. Dalam paradigma NPS, masyarakat tidak dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Jika dikaitkan dengan konflik Rempang Eco City, prinsip-prinsip NPS belum sepenuhnya terlaksana pada tahap awal pelaksanaan proyek. Masyarakat merasa belum memperoleh ruang partisipasi yang memadai sehingga muncul penolakan terhadap kebijakan relokasi. Kurangnya komunikasi dan transparansi mengenai manfaat pembangunan, mekanisme relokasi, serta perlindungan hak masyarakat menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Padahal, menurut Denhardt dan Denhardt (2015), keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari efisiensi pelaksanaan program, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun hubungan yang demokratis dengan masyarakat.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik Rempang Eco City seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan paradigma NPS, yaitu dengan memperkuat dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, investor, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan perlindungan terhadap hak-haknya sebelum kebijakan dijalankan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

BAB III

ANALISIS PARADIGMA DAN SOLUSI

3.1 Analisis Paradigma New Public Service (NPS) dalam Menghadapi Konflik Rempang Eco City

Konflik pembangunan Rempang Eco City adalah salah satu contoh dari konflik kebijakan publik yang melibatkan kepentingan pemerintah, investor, serta masyarakat setempat. Pemerintah melihat proyek ini sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat Pulau Rempang merasa pembangunan tersebut bisa menghilangkan tempat tinggal, hak atas tanah, identitas budaya, serta kelangsungan hidup kampung tua yang telah ditinggali secara turun-temurun. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan masyarakat menolak rencana pindah yang termasuk dalam proyek pembangunan.

Dari sudut pandang New Public Service (NPS), pemerintah bukan hanya bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dibuat dengan cara yang demokratis dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Paradigma ini menekankan bahwa suksesnya sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari pencapaian target ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Jika dilihat dari karakteristik NPS, konflik di Rempang menunjukkan bahwa proses komunikasi dan keterlibatan masyarakat belum berjalan dengan baik pada awal perencanaan pembangunan. Beberapa orang merasa masih belum mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai tujuan pembangunan, cara proses relokasi, jaminan atas hak kepemilikan, serta jenis kompensasi yang akan diberikan. Kondisi itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan, sehingga akhirnya berubah menjadi konflik sosial.

Paradigma NPS menganggap bahwa mengatasi konflik sebaiknya dilakukan dengan cara bekerja sama bersama. Pemerintah berperan sebagai penengah yang bisa menghubungkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, masyarakat tidak

hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga bisa menjadi pelaku yang berhak memberikan pendapat serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

3.2 Penerapan New Public Service dalam Penyelesaian Konflik

Penerapan gagasan New Public Service dalam mengatasi konflik Rempang Eco City bisa dilakukan dengan beberapa langkah strategis yang terencana. Pertama, pemerintah harus melakukan konsultasi dengan masyarakat secara terbuka sejak awal proses perencanaan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan, manfaat, risiko, serta dampak dari pembangunan tersebut. Keterbukaan informasi bisa membuat proses menjadi lebih transparan dan mengurangi salah paham yang bisa menyebabkan konflik.

Kedua, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, termasuk proses merencanakan pindahnya warga, menentukan jenis bantuan yang diberikan, hingga membuat program yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak. Pelibatan tersebut menunjukkan prinsip partisipasi yang merupakan ciri khas dari paradigma NPS.

Ketiga, pemerintah harus membangun cara untuk menyelesaikan masalah perselisihan dengan bantuan mediasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi, organisasi sipil, serta pihak-pihak yang tidak memihak. Dialog yang diadakan secara terbuka memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan harapan-harapan mereka dan bersama-sama mencari cara penyelesaian yang bisa diterima oleh semua orang.

3.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah bagian penting dalam gagasan New Public Service. Dalam kasus Rempang Eco City, bentuk partisipasi yang bisa dikembangkan mencakup:

- Keikutsertaan masyarakat dalam forum konsultasi publik.
- Penyampaian aspirasi melalui musyawarah bersama pemerintah.
- Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan relokasi.

- Partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.
- Penilaian bersama mengenai dampak sosial dan ekonomi dari proses pembangunan.

Dengan ikut serta dalam hal tersebut, masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam menetapkan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat.

3.4 Peran Pemerintah

Paradigma New Public Service menjadikan pemerintah sebagai pelayan rakyat (public servant), bukan hanya sebagai pengatur aturan. Oleh karena itu, pemerintah memainkan beberapa peran penting dalam menyelesaikan konflik Rempang, yaitu:

- Menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik.
- Melindungi hak-hak masyarakat terdampak.
- Memastikan proses pindah tempat dilakukan dengan fair setelah semua pihak sudah sepakat bersama.
- Menjaga kesetimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Peran tersebut diharapkan bisa membuat masyarakat lebih percaya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

3.5 Mekanisme Dialog dan Kolaborasi

Penyelesaian masalah konflik dengan mengacu pada pendekatan New Public Service lebih menekankan pada pentingnya berbicara dan bekerja sama bersama. Mekanisme yang bisa dilakukan adalah dengan membuat forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, BP Batam, investor, masyarakat, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Forum itu bertindak sebagai tempat untuk memberikan informasi, membahas berbagai pilihan penyelesaian, menyelesaikan perbedaan pendapat, serta mencapai kesepakatan bersama.

Kolaborasi yang terus berkelanjutan juga harus diiringi dengan pengecekan berkala agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat Pulau Rempang.

3.6 Kelebihan dan Kelemahan Penerapan New Public Service

Kelebihan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Mengurangi potensi konflik melalui pendekatan dialog.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Membuat kebijakan yang lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat.

Kelemahan

- Proses pengambilan keputusan menjadi lebih panjang.
- Membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.
- Perbedaan kepentingan dapat menghambat tercapainya kesepakatan.
- Dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dan menengahi masalah yang baik dari pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembangunan Rempang Eco City adalah proyek penting yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi dan mengembangkan area industri. Namun, pelaksanaannya menyebabkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat setempat terkait relokasi, hak atas tanah, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pulau Rempang.

Paradigma Pelayanan Publik Baru (NPS) cocok digunakan untuk menganalisis konflik tersebut karena menganggap masyarakat sebagai warga negara yang berhak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dialog, kerja sama, dan pertanggungjawaban, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih melibatkan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Saran

Pemerintah harus melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan pembangunan dengan mengadakan konsultasi yang terbuka dan berkelanjutan. Selain itu, cara berdiskusi yang melibatkan semua pihak yang terlibat harus ditingkatkan agar bisa mencapai kesepakatan yang seimbang dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dilengkapi dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, pemberian kompensasi yang adil, serta program pemberdayaan ekonomi yang bisa berkelanjutan. Sebab itu, pembangunan bisa berjalan sejalan dengan prinsip demokrasi, keadilan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adani, P. S., Asropi, & Widjayanti, A. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2).

Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(2), 51–58.

Doni, S., Sari, R. P., & Lubis, S. M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu.

The New Public Service: Serving, Not Steering. (2021). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.

Journal of Infrastructure, Regional Development and Governance. (2025). *Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project on Rempang Island Batam*. *Journal of Infrastructure, Regional Development and Governance*.

Journal of Constitutional and Governance Studies. (2025). *Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy*. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(2), 227–237.

Asian Politics & Policy. (2025). *Evolving Social Movement Strategies Against Green Grabbing: The Rempang Eco-City Case in Indonesia*. *Asian Politics & Policy*.

Journal of Social Politics and Governance. (2025). *Failures in the Governance of Coastal Authority in the Designation of National Strategic Projects: A Case Study of Rempang Eco City from the Perspective of Law No. 23 of 2014 on Local Government*. *Journal of Social Politics and Governance*.

Abdurrauf Social Science. (2025). *The Leadership Strategies in Improving the Quality of Public Services*. Abdurrauf Social Science.

SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. (2025). *Analisis Konflik Perebutan Wilayah Pembangunan Eco-City di Rempang, Kepulauan Riau Melalui Teori Johan Galtung*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah.

